



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
Ekonomi Unggul, Indonesia Maju



Tantangan dan Peluang Peningkatan Sistem Logistik Nasional

Dr. Atong Soekirman, SE., MM.

Bandung, 25 Juli 2024



www.ekon.go.id



[perekonomianRI](https://twitter.com/perekonomianRI)



[perekonomianRI](https://www.instagram.com/perekonomianRI)



[Kemenko Perekonomian RI](https://www.youtube.com/Kemenko_Perekonomian_RI)

Revisi Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional

- Akan berakhir tahun 2024

Revisi Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

- Belum optimal

Mitigasi Geopolitik Global

Penurunan Biaya Logistik
Nasional

Ketersediaan dan Harga
Barang Pokok antarwilayah

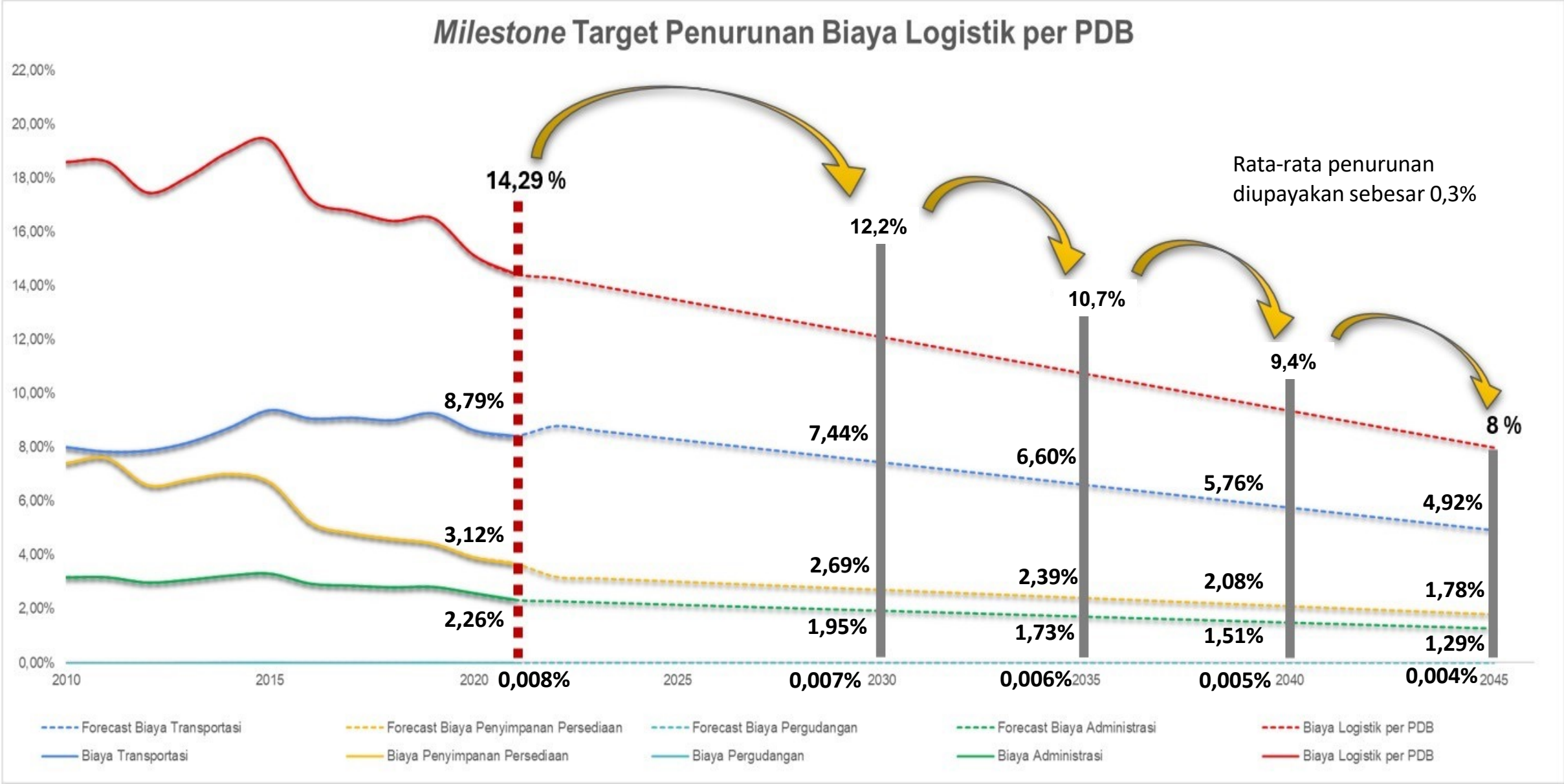
Konektivitas antarwilayah

- Aksesibilitas daerah 3T



Peringkat LPI

Pengembangan Logistik untuk Strategi Penurunan Biaya Logistik



Sumber: baseline berdasarkan perhitungan BLN Bappenas 2022, milestone penurunan BLN berdasarkan analisis internal Kemenko Perekonomian (2023)

STRUKTUR BIAYA LOGISTIK SECARA UMUM

1



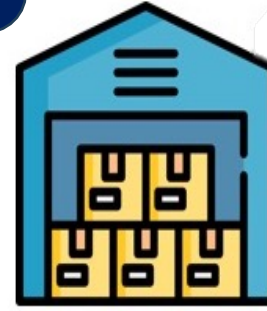
1. Biaya Transportasi

2



2. Biaya Penyimpanan Persediaan

3



3. Biaya Pergudangan

4



4. Biaya Administrasi

- **Biaya transportasi** mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara).
- Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan *inbound* atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi.
- Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya penyimpanan persediaan merupakan suatu ***opportunity cost*** (biaya kesempatan) yang timbul oleh karena menyimpan persediaan. *Opportunity Cost* ini **merupakan bunga** yang seharusnya bisa didapatkan apabila perusahaan memilih untuk menyimpan uang di bank.

Biaya pergudangan mengacu pada biaya yang terkait dengan pengoperasian gudang, seperti sewa, utilitas, tenaga kerja, asuransi, pemeliharaan, dan pajak.

Lingkup biaya administrasi;

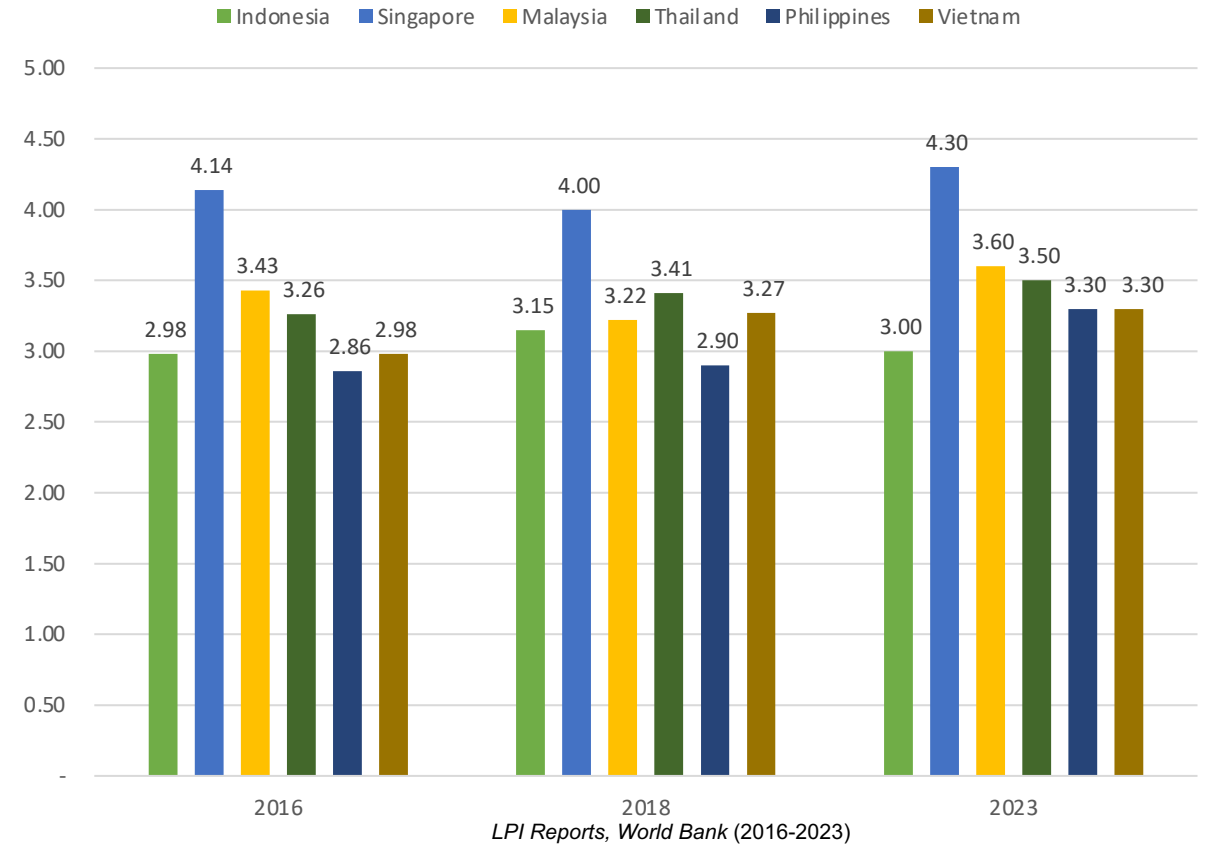
- (i) Gaji pegawai yang menangani pemesanan barang terkait produksi atau penjualan,
- (ii) Gaji pegawai yang menangani pengadaan jasa logistic,
- (iii) Biaya pengurusan perizinan barang, termasuk pungutan (jika ada), (iv) Biaya pembayaran *software* yang digunakan untuk proses administrasi.

Target Kinerja Logistik Indonesia: Penurunan Biaya Logistik s.d. 2045 dan Perbaikan LPI



Sumber: analisis internal Kemenko Perekonomian, 2023

LPI Score Asean Leading Countries



- ❑ Skor *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia turun dari posisi 46 ke 63.
- ❑ 6 Komponen LPI: **Customs**, **Infrastructures**, **International Shipments**, **Service Quality**, **Tracking and Tracing** serta **Timeliness**

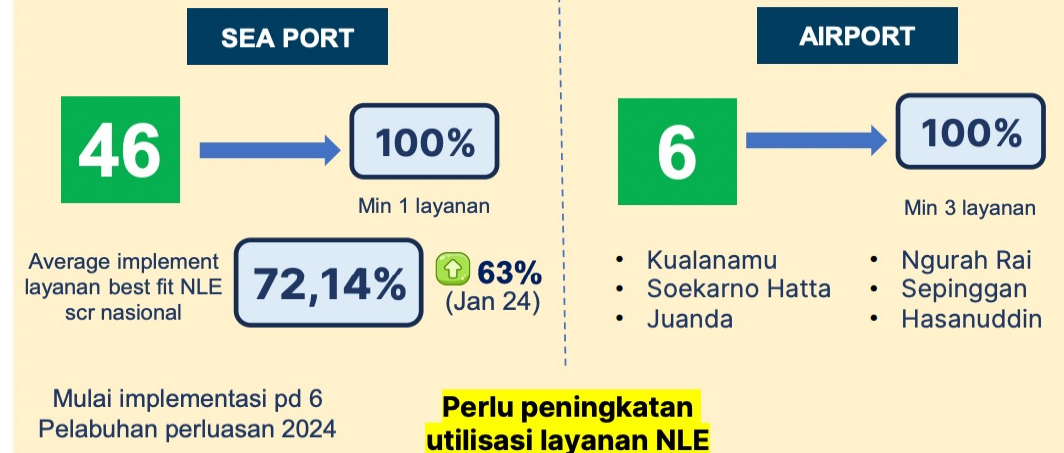
RINGKASAN IMPLEMENTASI NLE

Implementasi NLE pada 46 Pelabuhan target (minimal 1 layanan) & 6 bandara, telah berikan efisiensi pada waktu dan biaya. Perlu percepatan penyelesaian renaksi Inpres 5 terkait sinkronisasi Jalur KA Peti Kemas dan respon atas masukan pelaku usaha.

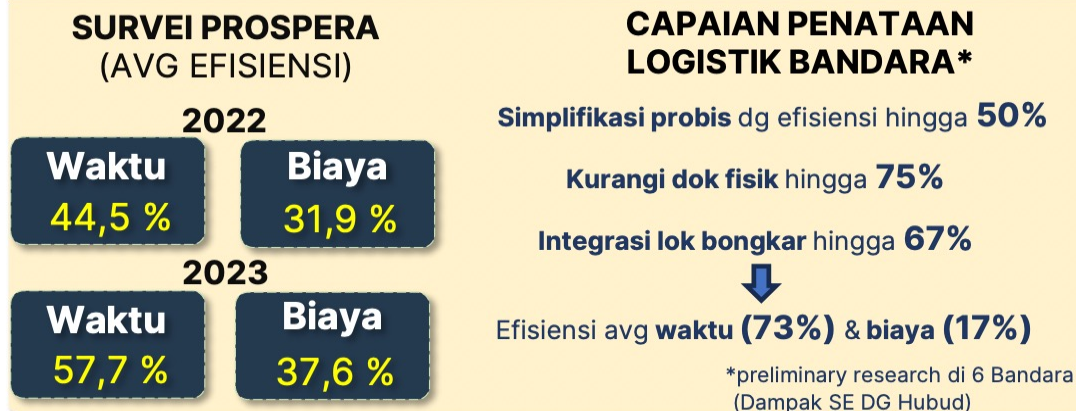
A. PROGRES PENYELESAIAN RENAKSI INPRES 5/2020



B. IMPLEMENTASI NLE



C. EFISIENSI YG DIHASILKAN



D. TESTIMONI



"NLE sbg Platform Kolaborasi dg semua K/L terkait dapat memangkas waktu dan biaya"

Oddy Medrian

PT Prima Bandar Samudera



"Siap mendukung untuk kelanjutan NLE dan survei ke depan"

Gemilang Tarigan

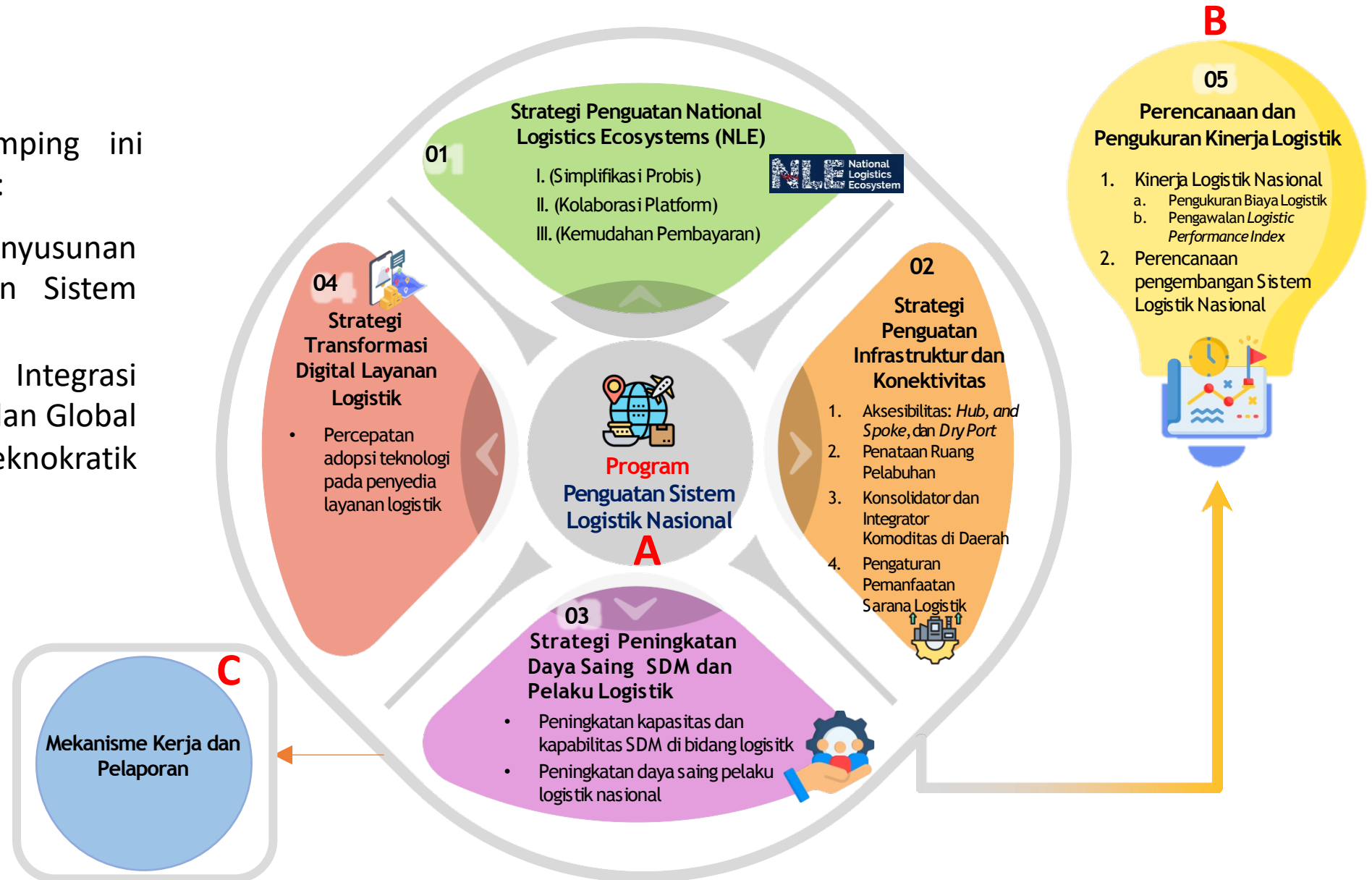
APTRINDO



Kerangka Pikir RPerpres

Kerangka pikir di samping ini adalah gabungan antara:

1. Kerangka pikir Penyusunan Rperpres Penguatan Sistem Logistik Nasional.
2. Kerangka pikir Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.



Tujuan RPerpres

Pasal 3

Penguatan Logistik Nasional bertujuan untuk:

- a. menurunkan biaya Logistik, memperlancar arus barang, dan meningkatkan pelayanan Logistik sehingga memperbaiki iklim usaha dan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya saing produk dan jasa nasional di pasar global dan pasar domestik;
- b. meningkatkan kinerja Logistik nasional dalam indikator kinerja Logistik global;
- c. menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan dalam proses produksi dan rantai pasok;
- d. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta mengurangi disparitas harga antarwilayah Indonesia terutama daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- e. mendukung daya saing ekspor barang dan jasa unggulan nasional; dan
- f. meningkatkan kemudahan aksesibilitas antarwilayah dan antardaerah.

Coverage RPerpres

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan presiden ini meliputi:

- a. strategi penguatan Logistik nasional;
- b. pengukuran kinerja Logistik nasional; dan
- c. mekanisme kerja dan pelaporan.

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

THANK YOU



@perekonomianRI



ekon.go.id



perekonomianRI

